

BAB VI

DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORETIK

Bagian ini merupakan inti analitis dari penelitian kualitatif deskriptif-analitik yang mendudukan temuan lapangan dalam konsetasi teoretis yang lebih luas. Sesuai dengan prinsip metodologi kualitatif, diskusi teoretik di sini tidak ditujukan untuk menguji apakah suatu teori "diterima atau ditolak" secara statistik, melainkan untuk melakukan dekonstruksi, rekonstruksi, dan sintesis atas teori-teori terdahulu yang telah diperdebatkan pada bagian awal.

Melalui interpretasi mendalam terhadap perilaku partai politik, mekanisme koalisi biner, dan dinamika strategi kemenangan pada Pilkada Kabupaten Lamongan 2024, bab ini akan merumuskan temuan konsep-konsep baru serta menegaskan posisi teoretik dan implikasi akademis dari penelitian tesis ini.

6.1 Profil Dua Poros Koalisi di Lamongan 2024

Pilkada Lamongan 2024 mengkristal menjadi polarisasi biner yang membagi kekuatan politik ke dalam dua kubu utama:

Tabel 6.1 Tabel Profil Dua Poros Koalisi di Lamongan 2024

Dimensi Analisis	Koalisi Lamongan Megilan (KLM)	Koalisi Lamongan Bagus (KLB)
Pasangan Calon	Yuhronur Efendi - Dirham Aksara	Abdul Ghofur - Firosyah Shalati
Status Politik	Petahana (Incumbent)	Penantang (Challenger)
Komposisi Partai	Koalisi Gemuk (9 Partai Parlemen: Golkar,	Koalisi Ramping (3 Partai Parlemen: PKB,

	Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat, PPP, NasDem, Perindo, PKS)	Demokrat - belakangan, PSI)
Karakter Strategi	Defensive-Hegemonic (Mengunci tiket dan mengapling teritori)	Offensive-Guerilla (Gerilya kultural dan eksploitasi isu lokal)

6.2 Pembahasan Dinamika Lapangan Berdasarkan Teori

6.2.1 Sintesis Faktor Internal: Pencairan Ideologi dan Pragmatisme Kekuasaan

Kasus Lamongan mengonfirmasi kebenaran teori Robertus Robet (2005) and William H. Riker (2006). Penyatuan PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKS dalam gerbong Koalisi Lamongan Megilan (KLM) membuktikan bahwa sekat ideologi mencair total di tingkat lokal.

Motivasi utama mereka bergabung dengan petahana Yuhronur Efendi digerakkan oleh tingginya Elektabilitas Calon (sesuai teori Burhanuddin Muhtadi) yang menjanjikan kemenangan logis, serta adanya tawar-menawar akses kekuasaan pemerintahan di masa depan (office-seeking interest).

Sebaliknya, PKB sebagai motor utama Koalisi Lamongan Bagus (KLB) bertindak atas nama Kepentingan Partai untuk menegaskan dominasi politiknya sebagai pemenang Pileg lokal di Lamongan, dengan mengusung ketuanya sendiri (Abdul Ghofur).

6.2.2 Sintesis Faktor Eksternal: Anomali Pasca-Putusan MK No. 60

Secara teoretis, Putusan MK No. 60 Tahun 2024 ditujukan untuk menurunkan ambang batas pencalonan agar melahirkan banyak poros alternatif (sesuai asumsi Hendra Yulianto). Namun di Lamongan, terjadi anomali.

Partai-partai menengah dan kecil justru memilih melakukan kartelisasi defensif dengan melebur ke petahana. Hal ini dikarenakan tingginya risiko politik dan biaya logistik jika harus membelah suara dalam kondisi elektabilitas petahana yang masih kokoh.

6.2.3 Strategi Pemenangan KLM: Pragmatisme Teritorial Terkapling

Sebagai koalisi raksasa, KLM mengadopsi strategi kampanye modern yang terstruktur (Yudi Latif, 2012). Mereka membagi 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan menjadi kapling-kapling tanggung jawab partai berdasarkan basis suara Pileg masing-masing anggota koalisi.

Kekuatan mesin birokrasi, jaringan kepala desa, dan penetrasi media sosial digunakan secara masif untuk mempertahankan citra keberhasilan program kerja petahana (seperti pembangunan infrastruktur jalan melalui program JAMULA).

6.2.4 Strategi Pemenangan KLB: Gerilya Populisme Kultural

Menghadapi kepungan koalisi gemuk, KLB merespons dengan pendekatan sosiokultural yang pekat (Muchtar E.P., 2013). Mereka menggerakkan jaringan

kultural Nahdliyin pedesaan (Muslimat, Fatayat, dan struktur ranting) secara gerilya.

Sesuai teori Budi Setiyono (2017), KLB secara agresif mengeksploitasi isu-isu lokal yang sensitif di akar rumput—seperti sisa infrastruktur jalan yang belum merata dan kelangkaan pupuk subsidi bagi petani—sebagai peluru politik untuk mendelegitimasi kinerja petahana.

Di sisi lain, pengangkatan isu ketimpangan infrastruktur jalan dan kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi bagian dari strategi untuk membentuk persepsi kritis terhadap kinerja petahana. Isu-isu tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya warga pedesaan dan kelompok petani. Dengan menghubungkan persoalan lokal dengan agenda kampanye, KLB berupaya menampilkan diri sebagai alternatif politik yang lebih responsif terhadap aspirasi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Lamongan.

6.3 Reposisi Perdebatan Teoretik: Batas-Batas Teori Klasik

Pada bagian awal rancangan penelitian ini, perdebatan teoretik dipandu oleh dua arus besar sosiologi-politik: Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) dengan varian Office-Seeking (William Riker, 1962) dan Policy-Seeking (Robert Axelrod, 1970), serta Teori Aliran/Pembelahan Sosiologis (Cleavage Theory) yang dikembangkan oleh Lipset dan Rokkan (1967).

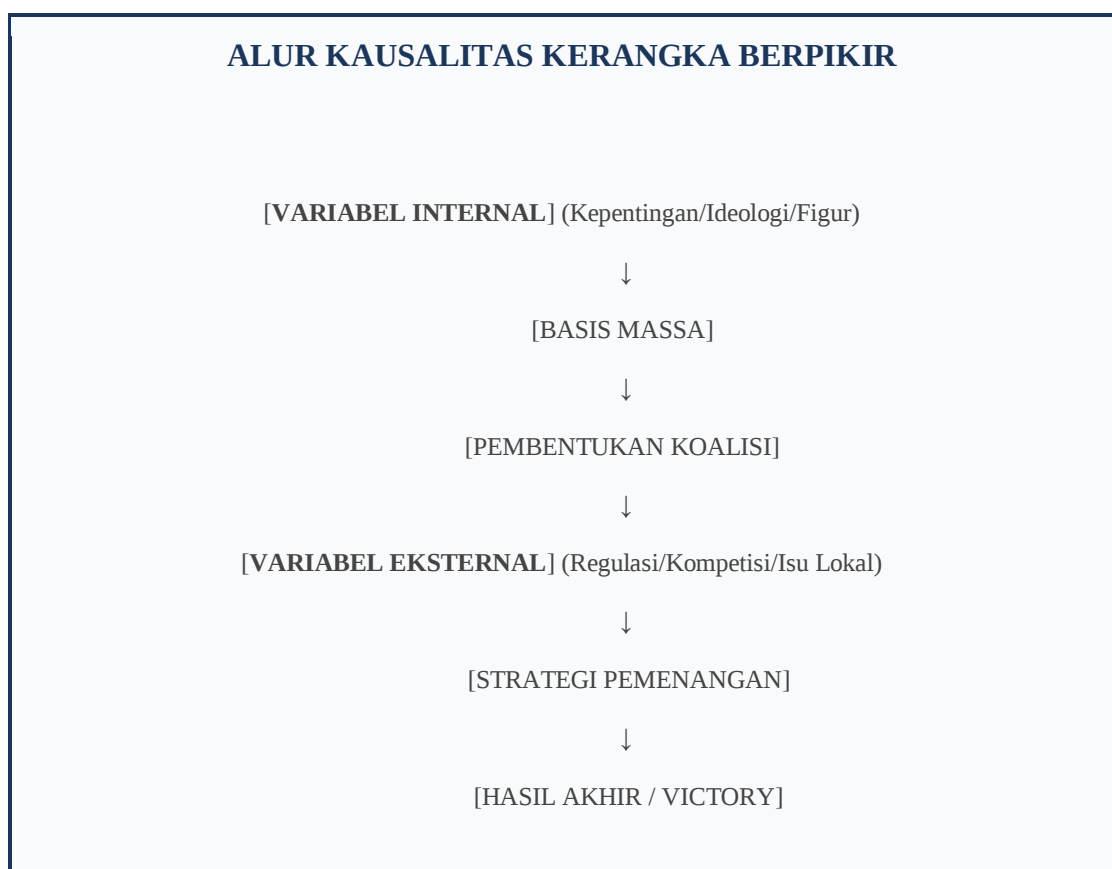
Dalam konteks koalisi partai politik, teori-teori klasik tersebut secara umum mengasumsikan dua preposisi utama:

1. Partai politik sebagai aktor rasional akan selalu berusaha membentuk koalisi seminimal mungkin (Minimum Winning Coalition) untuk memaksimalkan pembagian insentif kekuasaan (spoils of office) and memperkecil ruang kompromi kebijakan.
2. Pembelahan sosiologis (seperti sekat ideologi Islam vs Nasionalis atau Santri vs Abangan) bertindak sebagai jangkar utama yang membatasi dan mengarahkan dengan siapa sebuah partai dapat atau tidak dapat berkoalisi.

Namun, realitas empiris yang terekam pada Pilkada Kabupaten Lamongan 2024 menunjukkan anomali yang mendekonstruksi kedua preposisi linier tersebut. Kehadiran Koalisi Lamongan Megilan (KLM) sebagai koalisi raksasa (kartel gemuk berisi 9 parpol parlemen) yang menyokong pasangan petahana Yuhronur Efendi - Dirham Aksara, berhadapan langsung secara head-to-head dengan Koalisi Lamongan Bagus (KLB) yang ramping namun padat (PKB, Demokrat, PSI) yang mengusung Abdul Ghofur - Firosha Shalati, membuktikan bahwa logika politik lokal memiliki dinamika rasionalitas tersendiri yang tidak mampu dijelaskan secara utuh oleh teori sosiologi-politik barat.

6.4 Dekonstruksi Temuan Lapangan terhadap Kerangka Berpikir

Apabila temuan lapangan dianalisis menggunakan alur logis dari diagram kerangka berpikir kita dapat melihat bagaimana interaksi dialektis antara komponen hulu (internal) dan komponen kontekstual (eksternal) bekerja memengaruhi hilir kontestasi (strategi dan kemenangan).



Berdasarkan bagan Kerangka berfikir Variabel Internal (kepentingan parpol, ideologi, dan elektabilitas calon) terbukti bertindak sebagai penyaring awal (*initial filter*). Di Lamongan, tingginya daya tawar elektoral petahana menjadi katalisator yang mencairkan kekakuan ideologi parpol. Konvergensi variabel

internal ini mengonsolidasikan Basis Massa parpol untuk diserahkan ke dalam wadah Pembentukan Koalisi.

Namun, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa koalisi yang terbentuk tidak serta-merta bisa langsung mengeksekusi kemenangan. Struktur koalisi tersebut harus berbenturan terlebih dahulu dengan Variabel Eksternal (Putusan MK No. 60, kompetisi antar-partai pasca-Pileg, dan isu domestik seperti jalan rusak/JAMULA dan pupuk). Benturan inilah yang memaksa masing-masing poros mengkristalkan Strategi Pemenangan spesifik hingga bermuara pada Hasil Pilkada (Kemenangan).

6.5 Penemuan Konsep Baru (Sintesis Kualitatif)

Sesuai dengan khazanah penelitian kualitatif di mana tujuan akhirnya adalah building theory atau menemukan abstraksi konsep baru, penelitian ini berhasil merumuskan tiga konsep sosiologi-politik baru yang lahir dari abstraksi data riil di lapangan:

1. Kartelisasi Defensif Elektoral (Defensive Electoral Cartelization)

Teori kartel politik (Katz & Mair, 1995) biasanya menjelaskan bagaimana partai-partai politik memanfaatkan sumber daya negara secara kolektif di tingkat nasional untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya dari tantangan luar. Di tingkat lokal Pilkada Lamongan 2024, konsep ini mengalami mutasi sosiologis menjadi Kartelisasi Defensif Elektoral.

Kartelisasi Defensif Elektoral merujuk pada pola kerja sama antarpatai di tingkat lokal yang dibentuk untuk menjaga posisi dan kepentingan politik masing-masing dalam menghadapi persaingan pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan kartel politik di tingkat nasional yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya negara secara kolektif, kartelisasi pada Pilkada Lamongan 2024 lebih menekankan upaya mengurangi risiko kekalahan melalui pembentukan koalisi yang luas dan strategis.

Dalam konteks tersebut, koalisi antarpatai berfungsi sebagai mekanisme untuk mengonsolidasikan basis dukungan, memperkuat posisi kandidat, serta membatasi ruang gerak lawan politik. Kerja sama yang terbentuk tidak semata-mata didorong oleh kesamaan ideologi, melainkan oleh pertimbangan pragmatis mengenai peluang kemenangan, pembagian peran politik, dan upaya mempertahankan pengaruh dalam kontestasi politik lokal.

Definisi Konsep: Sebuah tindakan kolektif di mana partai-partai politik menengah dan kecil secara sukarela mengabaikan peluang maju mandiri (meskipun regulasi pasca-Putusan MK No. 60 melonggarkan ambang batas) dan memilih meleburkan diri ke dalam satu perahu koalisi petahana berskala raksasa. Motif utamanya bukan untuk memaksimalkan pembagian kursi birokrasi sejak awal, melainkan sebagai *collective defense mechanism* (mekanisme pertahanan bersama) untuk membendung kekuatan satu partai dominan (PKB) yang memenangkan Pileg lokal.

Dalam konsep ini, 'rasionalitas' diartikan sebagai tindakan menghindari risiko kekalahan telak (*risk-aversion behavior*) daripada mengejar keuntungan maksimal namun spekulatif.

2. Pragmatisme Teritorial Terkapling (Zoned Territorial Pragmatism)

Ketika mengkaji strategi kemenangan, pemasaran politik konvensional sering melihat kampanye sebagai mobilisasi massa yang bergerak secara seragam di seluruh wilayah. Riset ini menemukan konsep baru yang disebut Pragmatisme Teritorial Terkapling.

Definisi Konsep: *Sebuah model pembagian ruang kerja politik dan logistik kampanye secara transaksional-kontraktual di antara partai anggota koalisi besar, di mana perdebatan ideologis dibekukan dan dikonversi menjadi akuntabilitas geografis berdasarkan basis data suara yang diperoleh masing-masing partai pada pemilu legislatif sebelumnya.*

Melalui konsep ini, persaingan klasik antara PDI Perjuangan (Nasionalis-Sukarno) dan PKS atau PPP (Islam) tidak lagi relevan. Mereka tidak bekerja sebagai satu kesatuan ideologi koalisi yang abstrak, melainkan bertindak sebagai 'kontraktor teritorial' yang bertanggung jawab mengamankan suara paslon hanya di zonasi (kapling) wilayah kecamatan yang telah disepakati.

3. Gerilya Populisme Kultural (Cultural Populism Guerilla)

Sebagai antitesis dari dominasi infrastruktur birokrasi formal dan koalisi gemuk milik petahana, poros penantang melahirkan konsep Gerilya Populisme Kultural.

Definisi Konsep: *Sebuah taktik mobilisasi elektoral ofensif-asimetris yang memindahkan arena pertempuran politik dari ruang publik formal (institusi politik, media massa arus utama) ke ruang-ruang domestik-kultural berbasis keagamaan tradisional, dengan cara mengawinkan sentimen identitas komunal (ikatan*

emosional warga NU) dengan eksploitasi narasi defisit pembangunan fisik (seperti isu kerusakan jalan dan pupuk).

Konsep ini menunjukkan bahwa ketika parpol penantang mengalami kelangkaan dukungan struktural elite, mereka akan menggunakan sub-struktur keagamaan non-formal (seperti jaringan jamaah tahlil, Muslimat, dan Fatayat di pedesaan) sebagai mesin politik yang bergerak di bawah radar untuk mendelegitimasi petahana.

6.6 Posisi Teoretik Penelitian Tesis

Di manakah posisi penelitian tesis ini berada dalam belantara perdebatan teoretis sosiologi-politik? Berdasarkan temuan konsep-konsep baru di atas, penelitian ini memosisikan diri pada ranah Institusionalisme Pilihan Rasional yang Terkontekstualisasi (Contextualized Rational Choice Institutionalism).

Penelitian tesis ini menolak pandangan pilihan rasional klasik yang terlalu mekanistik-kuantitatif, yang mengasumsikan bahwa partai politik membentuk koalisi hanya berdasarkan hitungan matematis jumlah kursi parlemen atau ketersediaan dana logistik semata.

Namun di sisi lain, penelitian ini juga tidak menyepakati teori sosiologis murni yang menganggap pemilih lokal bertindak semata-mata karena loyalitas buta pada ikatan aliran agama (cleavage). Studi ini membuktikan bahwa pilihan rasional elite dan pemilih di tingkat lokal selalu dinegosiasikan, dibatasi, dan didefinisikan ulang oleh konteks institusional setempat, seperti kuatnya budaya paternalistik kiai serta nyata atau tidaknya dampak defisit pembangunan daerah di mata masyarakat.

6.7 Implikasi Teoretik terhadap Studi Pilkada di Indonesia

Temuan konseptual dari penelitian kualitatif di Kabupaten Lamongan ini membawa implikasi teoretik yang signifikan bagi perkembangan studi perilaku memilih (voting behavior), dinamika kepartaian lokal, dan sosiologi-politik di Indonesia:

- 1. Rekonseptualisasi Dampak Regulasi Pemilu (Putusan MK No. 60):** Secara teoretis, pelanggaran ambang batas pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi diprediksi oleh banyak pakar akan memecah hegemoni kartel politik dan melahirkan plurikandidasi (banyak calon) dalam Pilkada. Namun, implikasi teoretik dari riset ini memberikan tesis baru: di daerah yang memiliki figur petahana dengan tingkat elektabilitas dominan, pelanggaran regulasi justru memicu terjadinya penguatan kartelisasi defensif oleh parpol menengah-kecil demi rasionalitas kepastian kemenangan. Regulasi baru tidak serta-merta mengubah struktur kompetisi jika kalkulasi risiko kalah dari para elite lokal masih sangat tinggi.
- 2. Batas Efektivitas Pemasaran Isu (Issue-Based Marketing) dalam Masyarakat Paternalistik:** Teori komunikasi politik kontemporer sering kali mengagungkan kekuatan narasi isu domestik (seperti isu jalan rusak/JAMULA dan pupuk yang digaungkan oleh KLB) sebagai variabel penentu perubahan perilaku memilih. Implikasi teoretik dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat transisional yang masih kental dengan budaya paternalistik, narasi isu yang agresif akan mengalami penurunan efektivitas jika dihadapkan pada strategi defensif-hegemonik yang menguasai suprastruktur jaringan

formal. Dominasi jaringan birokrasi, relasi kepala desa, dan saturasi media luar ruang berskala masif terbukti lebih superior dalam memotong rantai transmisi isu negatif yang dilemparkan oleh oposisi.

- 3. Desakralisasi Variabel Ideologi dalam Sosiologi Politik Lokal:** Implikasi teoretik terakhir menegaskan bahwa sakralitas ideologi partai di tingkat lokal telah mengalami desakralisasi total. Pembelahan sosiologis (santri-abangan atau Islam-Nasionalis) kini tidak lebih dari sekadar instrumen kosmetik dalam kampanye. Dalam fase pembentukan koalisi dan perumusan strategi, parpol beroperasi sepenuhnya sebagai mesin pencari insentif kekuasaan yang sangat pragmatis, di mana ideologi dapat dicairkan dan dikonsolidasikan kapan saja demi mengamankan kepentingan electoral.